

organisasi-organisasi politik, mengingat partai dan organisasi politik merupakan ekspektasi besar dalam memberikan pendidikan politik cerdas kepada masyarakat, khususnya pada kesamaan hak perempuan dalam kancah politik. Dengan demikian, peran dan kuantitas perempuan di dalam lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) masih jauh di bawah dominasi kaum laki-laki.

Manusia adalah khalifah Tuhan dimuka bumi. Tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia. Dalam wacana Islam, politik (*al-siyasah*) secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan didunia dan kebahagiaan diakhirat.

Islam adalah agama yang melindungi setiap hak-hak manusia tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan, yang membedakan adalah tingkat ketakwaan manusia itu sendiri. Di antara hak-hak manusia itu adalah hak untuk memperoleh pekerjaan, sebab dalam Islam tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan.

Islam bahkan menganjurkan manusia bekerja untuk menjadikan kesejahteraan dan ketentraman keluarga. Islam mempunyai posisi yang unik karena mengakui status ekonomi perempuan yang independen dan memberi hak untuk memiliki, menggunakan dan menikmatinya tanpa perantara atau wali.

krusial dalam pembentukan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan lain-lain.

Meski demikian, masih banyak yang harus dilakukan untuk mengungkapkan sejarah keulamaan dan keilmuan di kalangan perempuan muslim, tidak hanya di Timur Tengah dan kawasan muslim lain, tetapi juga di Indonesia. Sebab seperti disimpulkan baik setelah mengkaji kehidupan keagamaan perempuan muslim. Posisi perempuan dalam masyarakat muslim termasuk di Indonesia tidak bisa dipahami tanpa apresiasi menyeluruh tentang konteks di mana mereka hidup, berbagai faktor budaya, politik, ekonomi, sosial dan bahkan agama saling mempengaruhi dalam menentukan posisi perempuan, tidak terkecuali ulama perempuan.

Di sini faktor religio-sosiologis menjadi sangat penting. Di lingkungan masyarakat muslim Indonesia. Seseorang baru benar-benar diakui sebagai ulama, jika telah diakui oleh komunitasnya sendiri sebagai ulama. Pengakuan itu datang bukan semata-mata mempertimbangkan keahlian dalam ilmu agama, khususnya fiqh, tetapi juga integritas moral dan akhlak yang dilengkapi dengan kedekatan dengan umat, khususnya pada tingkat grass root (akar rumput). Kedekatan dengan umat di lapisan bawah ini bisa disimbolkan

politik yang berdiri di Indonesia, disana terdapat Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan oleh KH. Abdurrahman Wahid atau lebih populer disebut Gus Dur.

Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai politik dengan basis dukungan berasal dari kalangan tradisional khususnya warga NU. Namun, walaupun demikian dalam “*Mabda Siyasi*” partai, PKB menegaskan diri sebagai partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Artinya, keterbukaan PKB tidak hanya disimbolkan dalam kehadiran kepengurusan atau keanggotaan yang pluralistik namun yang lebih substansial lagi adalah keterbukaan dalam sikap dan perilaku politik serta rumusan cita-cita partai tersebut.

Pada kerangka itulah PKB menjadi partai yang banyak mengakomodir isu-isu politik kontemporer yang tengah berkembang pada ranah politik global, termasuk salahsatunya peranan politik perempuan. PKB yang memiliki keterkaitan erat dengan para Ulama-ulama pondok pesantren melakukan tafsir ulang terhadap nash-nash al-Qur’an dan kitab-kitab fiqh yang pada masa lalu menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua.¹³

¹³*Gerakan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan yang dianggap mendiskriminasi kaum perempuan* di pimpin langsung oleh istri Gus Dur (Ibu Shinta Nuriah Wahid), pidatao pada acara MUSKER DPP PKB 2004.

kepemimpinan perempuan, baiat dan syuro, kegiatan politik dalam perspektif Fiqh Siyasyah.

Bab ketiga berisi tentang data-data di lapangan terkait dengan status politik perempuan di Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur.

Bab keempat menjelaskan analisa tentang status politik perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur beserta tinjauan fiqh siyasah. Dalam hal ini penulis juga menganalisa motif dan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya Badan Otonom Perempuan Bangsa.

Bab kelima Penutup bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah, sedang saran adalah harapan penulis selesai mengadakan penelitian.